

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, Sarwenda. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Timur: Umsida Press.
- Bharata, R,W., & Dewi, A,K. (2021). Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Edukasi*, 9(1).
- Hadi, F. N. A., Sudiarti, S. (2022). Peran DPRD dalam Memaksimalkan rancangan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, 3(2).
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, E, D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ecobuss*, 6(2).
- Honga, A, F., & Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(4), 278-288.
- Jannah, R., Daulay, A. N. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *JREA: Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 338-349.
- Kartika, D. & Kusuma, IC. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Akunida*, 1.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Pusaka Alamida.
- Makka, A,H., & Elim, I. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah di kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.
- Mamuaja, F.K (2020). Ipteks Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 4(1), 24-29.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang – undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.

- Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahmayanti, E., Murni., & Azhari. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Demak: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Ramadhanti, Rika. (2018). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 248-266.
- Rukayah, Kusumawati, N, Afriani, I.R. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4.
- Rusdi, M. (2018). *Penelitian Desain dan Pengembangan Kependidikan (Konsep, Prosedur, dan Sintetis Pengetahuan Baru)*. PT Raja Grafindo persada
- Widuri, T., Harianto, K, & Listari, I.I. (2022). Analisis Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa*, 4(2), 129-140.2
- Yuesti, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: Noah Aletheia



